



# LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT  
BADAN PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN BAHASA

# 2020





# LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT  
BADAN PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN BAHASA

# 2020





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2020 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun. Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Sekretariat BPP Bahasa) tahun 2020. Sekretariat BPP Bahasa pada tahun 2020 menetapkan satu Sasaran Strategis, yaitu Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan tiga indikator kinerja, yaitu Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB, Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK, dan Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91. Secara umum, Sekretariat BPP Bahasa telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, Sekretariat BPP Bahasa masih menemui beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun mendatang. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui dukungan, kerja sama, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dicapai oleh Sekretariat BPP Bahasa pada tahun 2020. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran, serta perumusan kebijakan bidang kebahasaan dan kesastraan melalui peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selesainya Laporan Kinerja Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2020.

Jakarta, 31 Januari 2021  
Sekretaris BPP Bahasa,

**Ovi Soviaty Rivay**

NIP 196703121993032002



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	vi
<b>IHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	7
A. Gambaran Umum .....	7
B. Dasar Hukum .....	9
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi .....	9
D. Isu Strategis .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	13
A. Rencana Strategis Tahun 2020—2020 .....	13
B. Perjanjian Kinerja Sekretariat BPP Bahasa Tahun 2020 .....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	17
A. Pencapaian Kinerja Sekretariat BPP Bahasa Tahun 2020 .....	17
B. Realisasi Anggaran .....	38
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	39



## DAFTAR LAMPIRAN

---

1. Perjanjian Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Lembar Reviu Laporan Kinerja
4. Surat Pernyataan telah Direviu
5. Nilai setiap Variabel Kinerja Anggaran Satker
6. Nilai setiap Variabel pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker
7. Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat BPP Bahasa Per Komponen Tahun 2020



## DAFTAR GAMBAR

---

- Gambar 1. Pelantikan Pejabat Fungsional dan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil
- Gambar 2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- Gambar 3. Kegiatan Bincang-Bincang Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Sahabat Bahasa di Radio Motion tentang Produk-Produk BPP Bahasa
- Gambar 4. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Pendampingan Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2021
- Gambar 5. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Eselon II Tahun 2020
- Gambar 6. Kampanye Pelaksanaan ZI-WBK di Balai Bahasa D.I. Yogyakarta
- Gambar 7. Studio Rekaman Kebahasaan , Balai Bahasa Provinsi Bali
- Gambar 8. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Satker dalam rangka Optimalisasi Nilai Kinerja
- Gambar 9. Alur Proporsi Nilai Kinerja Anggaran Berdasarkan Kewenangan
- Gambar 10. Variabel Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)



## DAFTAR TABEL

---

- Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB
- Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK
- Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Rata—Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91
- Tabel 4. Penyerapan Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan



## DAFTAR GRAFIK

---

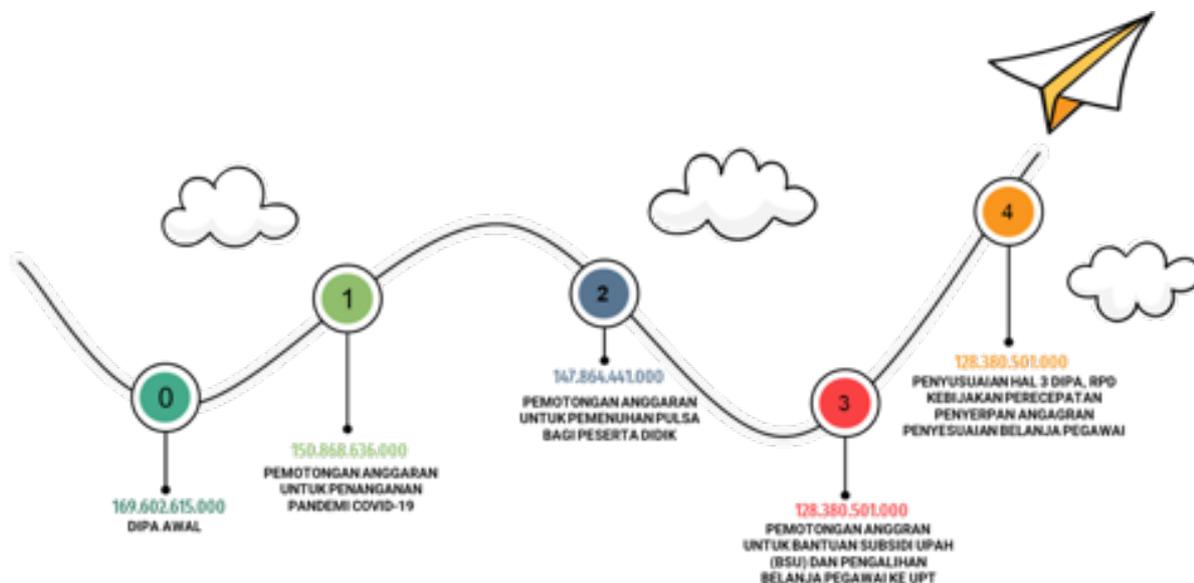
- Grafik 1. Capaian Nilai SAKIP Satker Tahun 2020
- Grafik 2. Capaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
- Grafik 3. Pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat, Jabatan Fungsional, Tingkat Pendidikan, dan Pangkat/Golongan
- Grafik 4. Penilaian Akuntabilitas Kinerja Satker di Lingkungan Badan Bahasa Tahun 2020
- Grafik 5. Nilai Rata-Rata Setiap Variabel Kinerja
- Grafik 6. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja
- Grafik 7. Realisasi Anggaran Per Output Kegiatan



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Strategis Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa disusun untuk menjadi panduan dan pedoman kerja bagi setiap pegawai di lingkungan Sekretariat BPP Bahasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Rencana Strategis tersebut memuat tata nilai, visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan serta indikator yang dilengkapi dengan target kinerja yang harus dicapai selama lima tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Rencana Strategis Sekretariat BPP Bahasa merupakan penggerak utama tata kelola kelembagaan yang di dalamnya memuat kebijakan rencana program, kegiatan, dan anggaran yang mendukung peningkatan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Pada tahun 2020, alokasi anggaran awal Sekretariat BPP Bahasa sebesar Rp169.602.615.000,00 (sertus enam puluh sembilan miliar enam ratus dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah). Jumlah anggaran tersebut didistribusikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat BPP Bahasa. Pada perjalanannya, anggaran Sekretariat Badan mengalami empat kali revisi, dengan penjelasan sebagai berikut.



Sampai dengan masa akhir anggaran 2020, Sekretariat BPP Bahasa dapat merealisasikan anggarannya sebesar Rp120.847.471.448,00 atau 94,13%.

Laporan Kinerja Sekretariat BPP Bahasa tahun 2020 menyajikan capaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2020 yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan

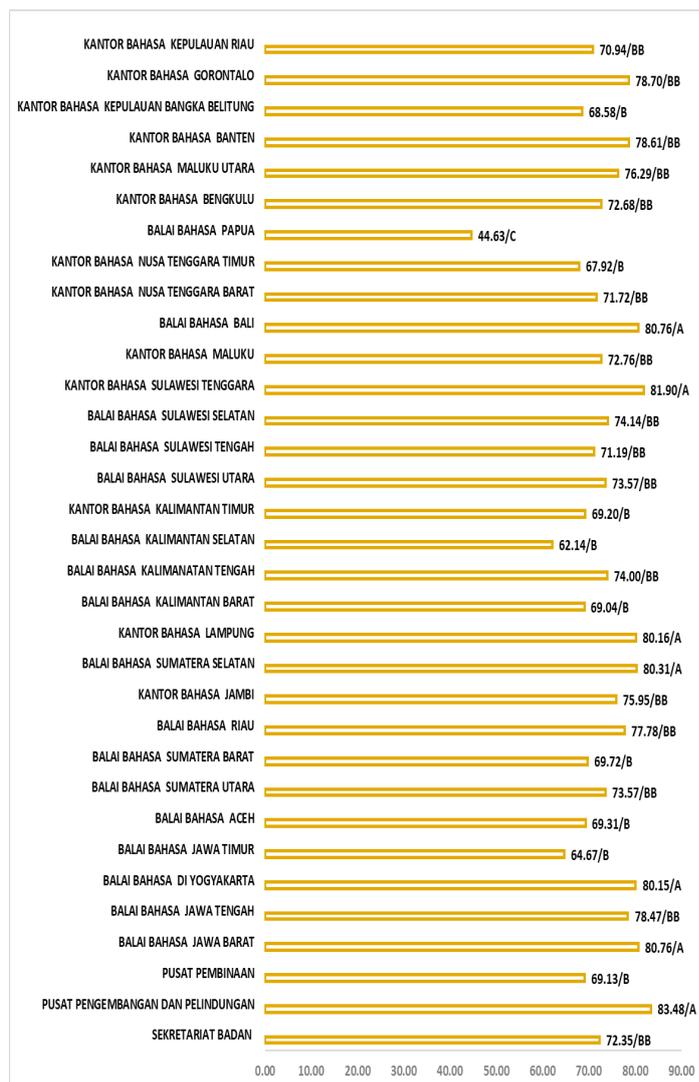
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki tiga indikator kinerja, yaitu (1) Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB, (2) Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK, dan (3) Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91. Tingkat ketercapaian dan ketidaktercapaian indikator kinerja lebih rinci dijelaskan pada Bab III.

Secara umum, capaian kinerja Sekretariat BPP Bahasa, dapat digambarkan sebagai berikut.

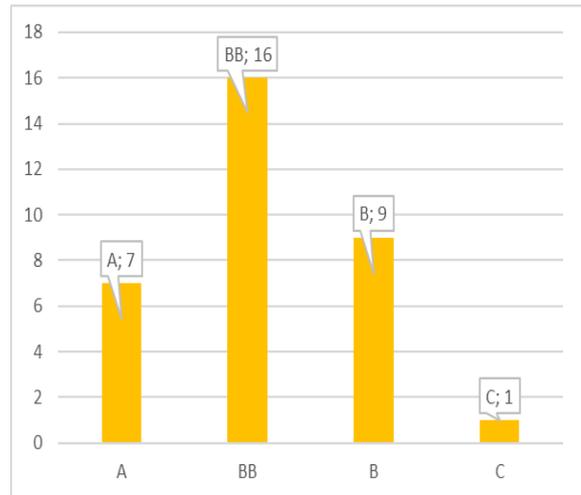
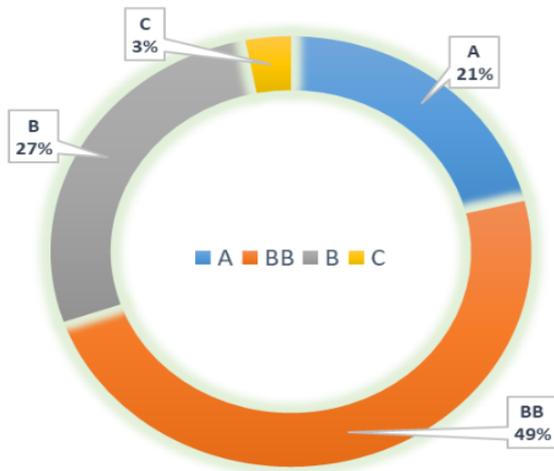
## SK 1 Meningkatkan Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

### IKK 1. Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB

**Grafik 1.**  
**Capaian Nilai SAKIP Satker Tahun 2020**



Dari hasil penilaian akuntabilitas kinerja satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020, jumlah satker yang memperoleh nilai C sebanyak satu satker, nilai B sebanyak sembilan satker, nilai BB sebanyak enam belas satker, dan nilai A sebanyak tujuh satker, sehingga dirata-ratakan hasil nilai akuntabilitas kinerja satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020, **memperoleh nilai BB dengan skor nilai 73,56 dengan interpretasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen**



## IKK 2. Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK

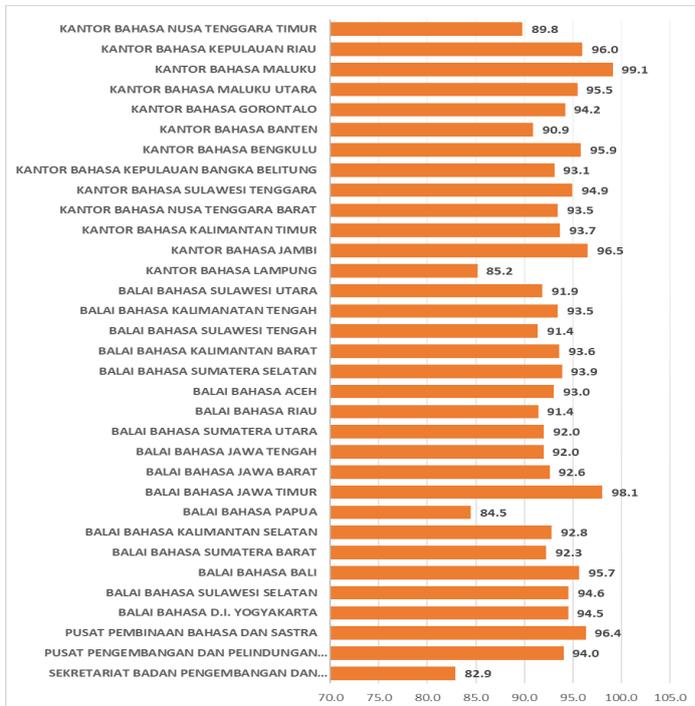


Dari target lima satker yang dibina menuju ZI-WBK terealisasi enam satker di tahun 2020. Enam satker tersebut diusulkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai calon satuan kerja berpredikat WBK. Hal tersebut berdasarkan surat Kepala Badan Nomor 2572/11/OT/2020 tanggal 27 Mei 2020.

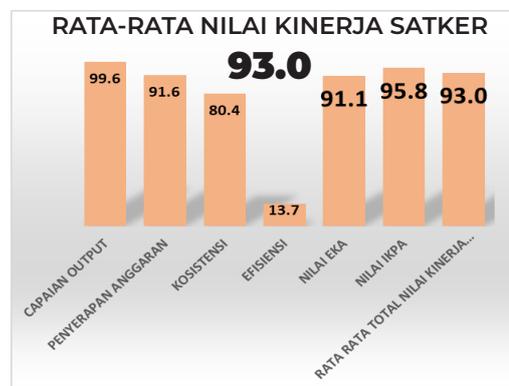
### IKK 3. Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91

Grafik 2.

#### Capaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L



Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)



Persentase capaian indikator kinerja **Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91** adalah 102% atau skor 93.0. Target indikator tersebut dapat dicapai dengan baik di tahun 2020.

Beberapa kendala dan hambatan yang ditemui oleh Sekretariat BPP Bahasa dalam mencapai target kinerja di tahun 2020, sebagai berikut.

1. Kurangnya komitmen pimpinan satuan kerja dalam mengimplementasikan SAKIP.
2. Kurangnya kepedulian dan dukungan sebagian pegawai dalam mengimplementasikan SAKIP.
3. Belum semua satker membentuk tim SAKIP.
4. kekurangan dokumen pendukung dalam penilaian akuntabilitas kinerja.
5. Belum adanya kesepahaman pada satuan kerja yang ditunjuk terkait data dukung lembar kerja evaluasi ZI-WBK.
6. Standar minimal sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan kerja dalam pemenuhan layanan belum seragam.
7. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa satker kurang maksimal dalam pencapaian output.

- 
8. Nilai konsistensi beberapa satker rendah karena deviasi pada lembar III DIPA terkait Rencana Penarikan Dana (RPD) terhadap penggunaan anggaran.
  9. Nilai IKPA kurang optimal karena beberapa variabel nilainya rendah, seperti kurang konsisten terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD), penyerapan anggaran, dll.

Upaya yang dilakukan oleh Sekretariat BPP Bahasa dalam mengatasi kendala dan hambatan, yaitu sebagai berikut.

1. Melakukan pendampingan penyusunan rencana strategis kepada satuan kerja.
2. Melakukan penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kinerja satuan kerja secara serentak.
3. Melakukan peningkatan mutu SDM SAKIP di lingkungan BPP Bahasa.
4. Melakukan Pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran satker secara rutin.
5. Melakukan Pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran satker secara periodik.
6. Melakukan pendampingan evaluasi kinerja di lingkungan BPP Bahasa.
7. Melakukan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja satker di lingkungan BPP Bahasa.
8. Melakukan sosialisasi ZI-WBK secara berkala kepada seluruh satuan kerja di lingkungan BPP Bahasa.  
Merumuskan kebijakan standar sarana dan prasarana terkait pelayanan masyarakat yang harus disiapkan oleh satuan kerja di lingkungan Badan Bahasa.





Gambar 1  
Pelantikan Pejabat Fungsional dan  
Pengambilan Sumpah Pegawai  
Negeri Sipil

## BAB I

# PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

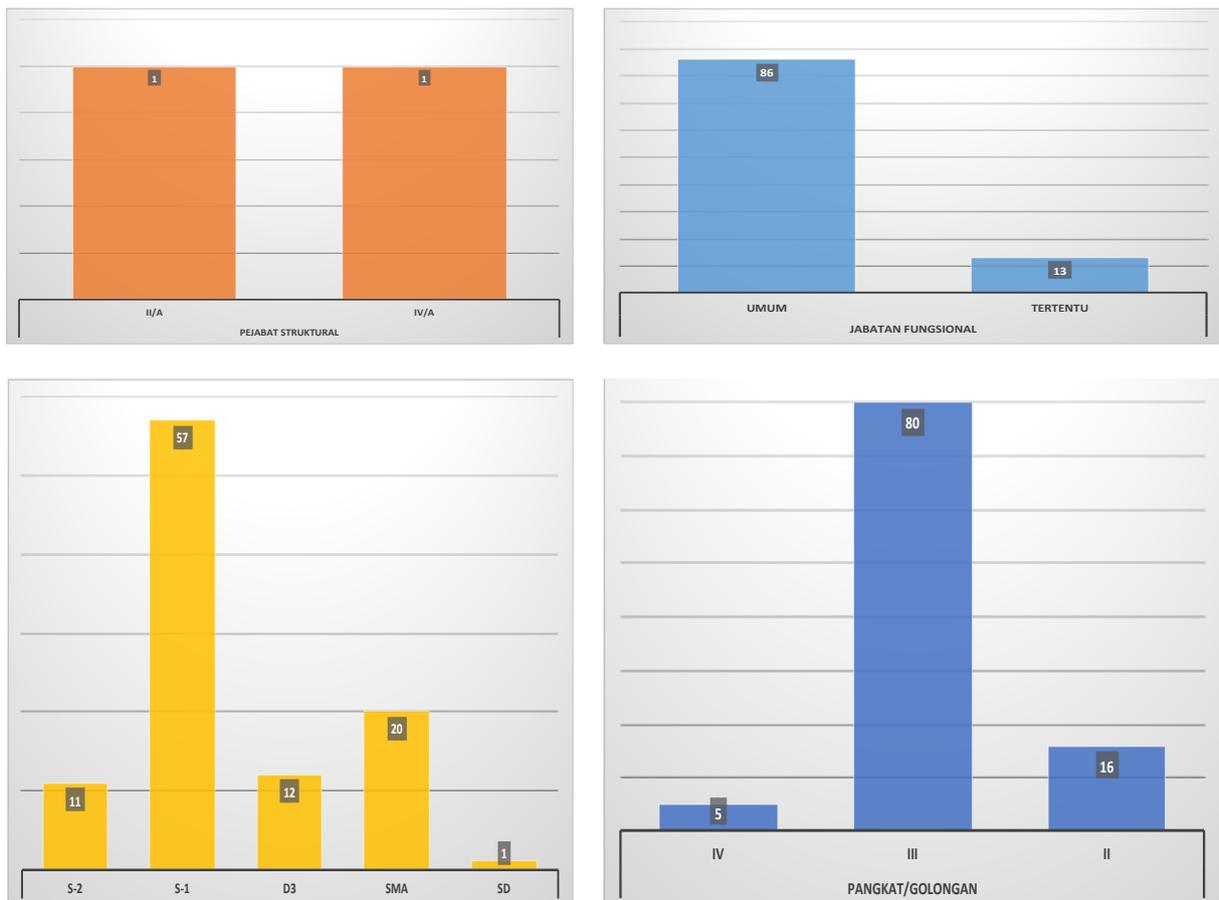
**S**ekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam melaksanakan program dan perencanaan strategis tahun 2020—2024 merupakan penggerak utama tata kelola kelembagaan, berperan sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Bahasa. Untuk mewujudkan reformasi birokrasi, diperlukan serangkaian upaya terpadu di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara, yaitu meliputi perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur yang progresif, perencanaan program dan kegiatan yang tepat dan akurat, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, pembinaan hukum, pelayanan publik yang baik, pelaksanaan kebijakan bahasa dan sastra melalui fungsi kehumasan dan pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. Untuk mewujudkan upaya terpadu tersebut, Sekretariat BPP Bahasa berupaya membangun sistem kerja dan iklim organisasi yang transparan dan akuntabel agar dapat menjalankan

reformasi birokrasi tersebut.

Sekretariat BPP Bahasa merupakan salah satu satker eselon II di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang dipimpin oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terbentuk pada tahun 2010 setelah disahkannya Peraturan Presiden nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Pusat Bahasa berganti nama menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, unit utama (eselon I) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa didukung oleh 101 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian, seperti ekonomi, keuangan, hukum, teknis, administrasi dll.

**Grafik 3.**

**Pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat, Jabatan Fungsional, Tingkat Pendidikan, dan Pangkat/Golongan.**



## B. DASAR HUKUM



## C. TUGAS DAN FUNGSI



### TUGAS

Melaksanakan pelayanan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan serta urusan ketatausahaan Badan

## FUNGSI

1. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang bahasa dan sastra Indonesia.
2. Pengelolaan data dan informasi di bidang bahasa dan sastra Indonesia.
3. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang bahasa dan sastra Indonesia.
4. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Badan.
5. Penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Badan.
6. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan.
7. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan.
8. Penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang bahasa dan sastra Indonesia.
9. Pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan.
10. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang bahasa dan sastra Indonesia.
11. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan.



## STRUKTUR ORGANISASI

Secara organisasi, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dipimpin oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan, terdiri atas Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Badan.



## D. ISU STRATEGIS

Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana administratif serta koordinator pelaksana tugas unit organisasi di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa masih banyak menemui permasalahan atau hambatan dalam melaksanakan tugas tersebut. Permasalahan yang menjadi perhatian, yaitu sebagai berikut.

1. Satker yang berkomitmen untuk menerapkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZIWBK/WBBM) masih rendah.
2. Pelaksanaan peningkatan Mutu SDM tenaga administrasi maupun teknis belum dilaksanakan secara merata dan berkelanjutan.
3. Satker masih belum optimal dalam menerapkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Rencana Strategis 2020—2024 Eselon I, belum tersosialisasikan dengan baik kepada satker di bawahnya.
5. Target dan capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis belum sinkron antara Eselon I dengan satuan kerja di bawahnya.
6. Penghapusan barang dan lelang di Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengalami kendala karena tidak ada penawaran yang masuk sampai batas waktu lelang habis yang mengakibatkan obek lelang tidak berlaku (gagal lelang).
7. Usulan pembangunan gedung/kantor satker masih terkendala dengan adanya moratorium pembangunan gedung dari pemerintah.





**Gambar 2**  
Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara Kepala Satuan Kerja di Lingkungan badan Bahasa dengan Kepala Badan Bahasa

## BAB 2

# PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020—2024

Perencanaan Strategis Sekretariat BPP Bahasa 2020—2024 adalah komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis dalam rangka meningkatkan kinerja melalui pengelolaan organisasi yang berbasis kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga, efisiensi, dan efektivitas penggunaan sumber daya di lingkungan Sekretariat BPP Bahasa.

Pelaksanaan kinerja lembaga dilaksanakan melalui perencanaan yang tepat, terarah, dan akurat, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, pelayanan publik yang prima serta meningkatkan fungsi kehumasan yang optimal, serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien. Rencana Strategis Sekretariat BPP Bahasa 2020—2024 mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Berdasarkan

rencana strategis tersebut, ditetapkan visi dan misi. Visi Sekretariat BPP Bahasa tahun 2020—2024 mengacu pada Visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diturunkan dari Visi Presiden, yaitu.



**VISI**

“Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Melalui Terciptanya Pelajar Pancasila yang Bernalar Kritis, Kreatif, Mandiri, Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia, Bergotong Royong, dan Berkebinekaan Global”

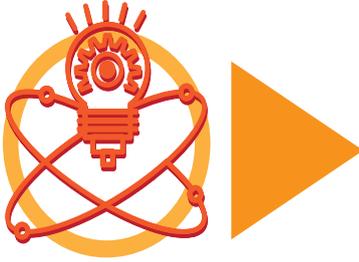


**MISI**

- Mewujudkan Ekosistem Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendukung Budaya Riset dan Inovasi Kebahasaan yang Kreatif
- Mewujudkan Budaya Listerasi Masyarakat yang Tinggi
- Mewujudkan penguatan praktik diplomasi kebahasaan yang maju
- Mewujudkan Pelindungan Bahasa dan Sastra yang Dinamis Berdasarkan Politik dan Perencanaan Bahasa Baru



Tujuan Strategis Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



Peningkatan Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

## B. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN TAHUN 2020

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui Perjanjian Kinerja tahun 2020. Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Sekretariat BPP Bahasa tahun 2020.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Revisi (Rp)
1	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	1 Rata-Rata Pre-dikat SAKIP Satker Minimal BB	BB	17,121,680,000	8,236,880,000
		2 Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK	5	29,756,891,000	23,954,490,000
		3 Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	91	122,724,044,000	96,189,131,000





**Gambar 3**  
Kegiatan Bincang-Bincang Sekretaris Badan Bahasa dengan Sahabat Bahasa di Radio Motion tentang Produk-Produk Badan Bahasa

## BAB 3

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN

Pengukuran kinerja Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa disusun dalam rangka mengukur keberhasilan capaian sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan pada awal tahun yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Sekretariat BPP Bahasa melakukan klarifikasi atas hasil dan manfaat program dan kegiatan yang dicapai dalam rangka mewujudkan organisasi yang akuntabel. Selain itu, hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja lembaga yang menjalankan tugas fungsi sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran kepada masyarakat pada akhir tahun anggaran. Pengukuran kinerja Sekretariat BPP Bahasa dilakukan secara periodik dalam satu tahun anggaran, yaitu dengan menyandingkan target dan capaian kegiatan untuk diukur capaian kinerja kegiatan dan capaian kinerja anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2020. Dalam perjanjian kinerja Sekretariat BPP Bahasa ditetapkan satu

sasaran kegiatan dan tiga indikator kinerja. Berikut informasi tingkat ketercapaian tiga indikator selama tahun 2020, yaitu.



## Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	1	Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB	BB	BB	100
		2	Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK	5	6	120
		3	Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	91	93.0	102

Tata kelola yang baik tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran Sekretariat BPP Bahasa dalam meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ditetapkan salah satu prinsip untuk menjadi indikator Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang harus dicapai pada masa renstra 2020—2024, yaitu Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB.

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian indikator Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB di tahun 2020 dapat dicapai dengan baik oleh Sekretariat BPP Bahasa, dengan rata-rata skor nilai 73,56 dengan interpretasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen.

Penjelasan lain mengenai pencapaian target setiap indikator kinerja, adalah sebagai berikut.

# 1

## Indikator Kinerja Kegiatan

### Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB



**Gambar 4**  
Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Pendampingan Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2021

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas

sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP ini termasuk salah satu komponen pengungkit dan hasil pada penilaian Reformasi Birokrasi. Komponen pengungkit terletak pada penguatan akuntabilitasnya, sedangkan komponen hasil terletak pada penilaian akuntabilitas kinerjanya. Akuntabilitas kinerja merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas kinerja yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya terus berupaya agar sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat berjalan dan diimplementasikan dengan baik.

Pada Rencana Strategis 2020—2024, Sekretariat BPP Bahasa mempunyai tanggungjawab dalam mencapai target indikator kinerja yang mendukung sasaran kegiatan “Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa”. Target indikator kinerja tersebut, yang harus dicapai oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu **“Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB”**.

Untuk melihat capaian indikator kinerja Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.**

**Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB**

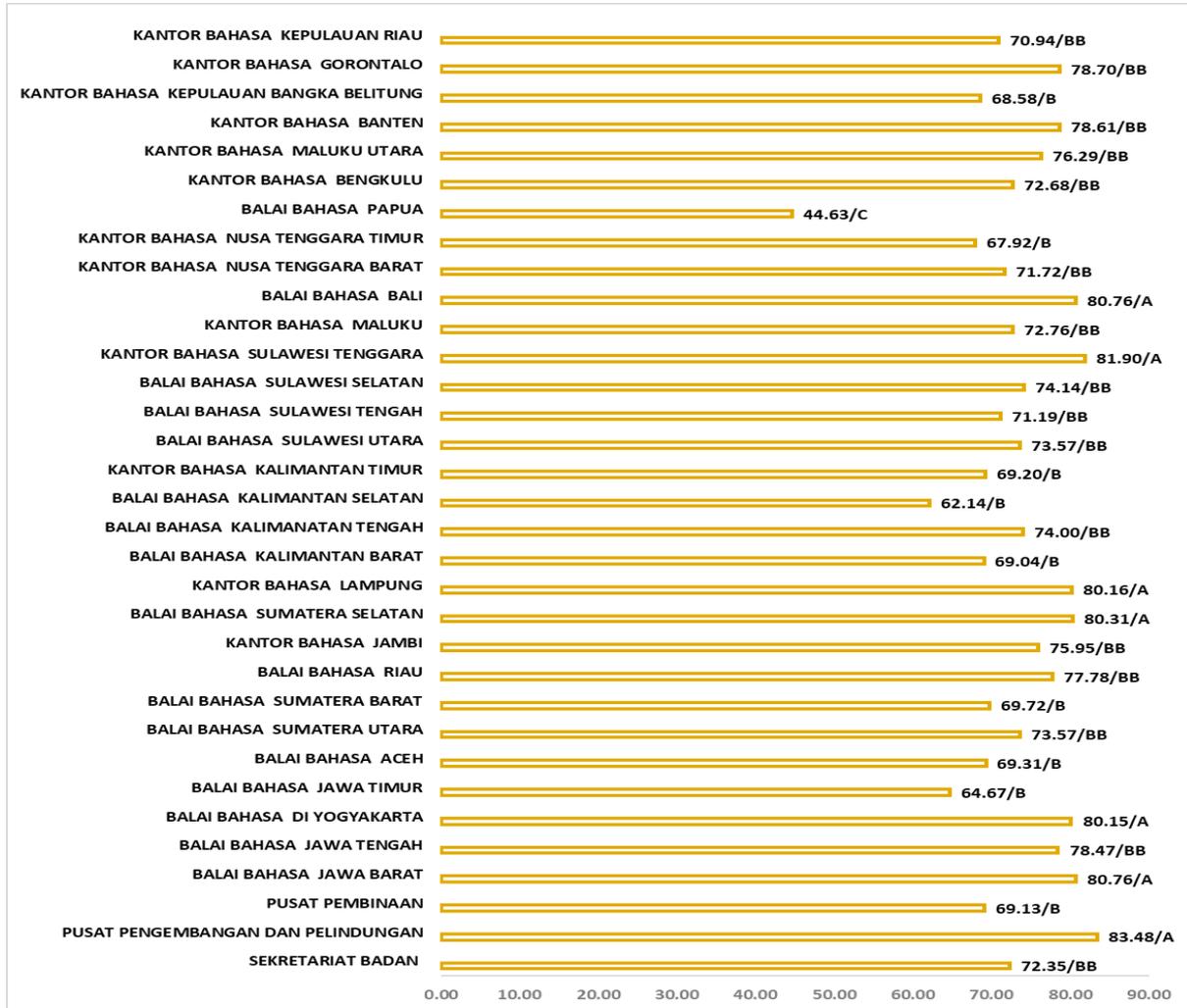
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	%	
Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB	BB	BB	100	BB

Indikator Kinerja “Rata-Rata Predikat SAKIP satker Minimal BB” tingkat capaiannya telah mencapai terget yang ditetapkan. Rata-Rata Predikat SAKIP Satker pada tahun 2020 ditargetkan memperoleh nilai BB/sangat memuaskan dengan rentang nilai pada angka >70-80. Nilai tersebut diperoleh dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

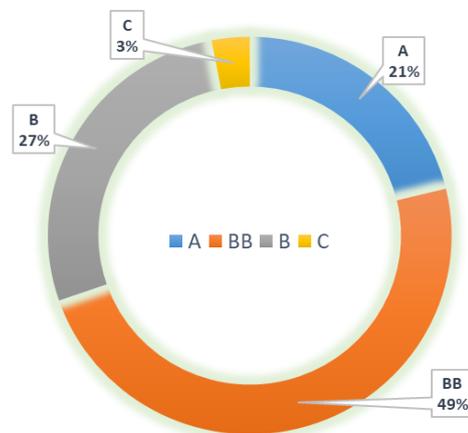
Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua lembaga tersebut merupakan lembaga yang bertugas dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2020 di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dilaksanakan pada bulan November 2020. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut, nilai yang diraih oleh 33 satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat dilihat pada grafik berikut.

#### Grafik 4.

### Penilaian Akuntabilitas Kinerja Satker di Lingkungan Badan Bahasa Tahun 2020



**Gambar 5**  
Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Eselon II  
Tahun 2020



Dari hasil penilaian akuntabilitas kinerja satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020, jumlah satker yang memperoleh nilai C sebanyak satu satker, nilai B sebanyak sembilan satker, nilai BB sebanyak enam belas satker, dan nilai A sebanyak tujuh satker, sehingga dirata-ratakan hasil nilai akuntabilitas kinerja satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020, memperoleh nilai BB dengan skor nilai 73,56 dengan interpretasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen.

Adapun rincian nilai per komponen dan catatan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2020, dapat disimpulkan sebagai berikut.

## PERECANAAN KINERJA

1. Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra agar dilengkapi Indikator Tujuan dan Target Keberhasilan. Rumusan Indikator Tujuan dan Target dapat mengacu pada Indikator Kinerja (IKSS) dan target Indikator Kinerja (target IKSS pada akhir periode Renstra) pada unit kerja di atasnya.
2. Renstra agar direviu secara berkala (minimal setahun sekali) untuk memastikan: (1) keselarasan rumusan tujuan/sasaran/indikator dengan tugas dan fungsi Unit Kerja, (2) untuk mengetahui tingkat capaian/realisasi dari target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun berjalan dan target akhir Renstra. Hasil reviu dapat berupa laporan hasil evaluasi atas capaian target Renstra, kendala, permasalahan dan rencana tindak.
3. Rencana Aksi agar mencantumkan kegiatan/komponen rinci pada masing-masing indikator kinerja setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja
4. Perjanjian Kinerja agar dimanfaatkan oleh pimpinan untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan yang antara lain dapat diwujudkan melalui sosialisai Perjanjian Kinerja oleh pimpinan kepada seluruh pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, serta dijadikan acuan dalam penyusunan PK individu dan didokumentasikan dengan baik.



## PENGUKURAN KINERJA

Penyusunan Indikator kinerja individu (Perjanjian Kinerja Individu) agar mengacu pada Indikator kinerja satuan kerja/unit kerjanya (cascading/turunan dari Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Kerja)

## PELAPORAN KINERJA

Informasi pada Laporan Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan Unit Utama untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja, yang antara lain dapat diwujudkan dalam Rapat Evaluasi Akhir atau Awal Tahun dan didokumentasikan



## EVALUASI KINERJA

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, evaluasi kinerja (target PK) dan Evaluasi rencana aksi (kegiatan) agar dilakukan secara berkala (minimum triwulan) dengan memanfaatkan aplikasi e-kinerja. Hasil evaluasi berupa laporan evaluasi/ notula rapat yang memuat rekomendasi Pimpinan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/ penanggungjawab kegiatan
2. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya agar ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan SAKIP di masa yang akan datang

## PENCAPAIAN SASARAN/ KINERJA ORGANISASI

Unit utama agar secara terus menerus melakukan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar pencapaian target kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja



Untuk pencapaian kinerja satker mandiri Sekretariat BPP Bahasa tahun 2020 mengalami peningkatan nilai, jika dibandingkan dengan tahun 2019. Nilai akuntabilitas kinerja yang diperoleh di tahun 2019 kategori B mengalami peningkatan di tahun 2020, yaitu kategori BB dengan nilai 72,35 dengan rincian nilai per komponen, sebagai berikut.

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30% diperoleh nilai 25,88%
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25% diperoleh nilai 19,69%
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15% diperoleh nilai 11,06%
4. Evaluasi Kinerja dengan bobot 10% diperoleh nilai 1,97%
5. Pencapaian Sasaran/kinerja organisasi dengan bobot 20% diperoleh nilai 13,75%

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan “Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB”, didukung oleh komponen kegiatan, yaitu sebagai berikut.



Melihat hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun 2020, capaian target indikator “Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB” dapat dicapai dengan baik oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Namun, dalam upaya pencapaian target tersebut, masih terdapat kendala atau hambatan yang ditemui, di antaranya:

1. kurangnya komitmen pimpinan satuan kerja dalam mengimplementasikan SAKIP;
2. kurangnya kepedulian dan dukungan sebagian pegawai dalam mengimplementasikan SAKIP;
3. kekurangan dokumen pendukung dalam penilaian akuntabilitas kinerja;
4. belum semua satker membentuk tim SAKIP.

Upaya yang dilakukan oleh Sekretariat BPP Bahasa untuk meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pendampingan penyusunan rencana strategis satuan kerja.
2. Melakukan penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kinerja satker secara serentak.
3. Melakukan peningkatan mutu SDM SAKIP di lingkungan Badan Bahasa.

4. Melakukan Pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran satker secara rutin.
5. Melakukan Pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran satker secara periodik.
6. Melakukan pendampingan evaluasi kinerja di lingkungan Badan Bahasa.
7. Melakukan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Bahasa.

## 2 Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK



**Gambar 6**  
Kampanye Pelaksanaan ZI-WBK di Balai Bahasa D.I. Yogyakarta

Untuk melihat capaian indikator kinerja **Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK** dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 2.**

### Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	%	
Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK	5	6	120	2

Dari target lima satker yang dibina menuju ZI-BK terealisasi enam satker di tahun 2020. Kelima satker tersebut adalah

1. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
2. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra;
3. Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat;
4. Balai Bahasa D.I. Yogyakarta;
5. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur;
6. Balai Bahasa Provinsi Bali.

Enamsatker tersebut diusulkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai calon satuan kerja berpredikat WBK. Hal tersebut berdasarkan surat Kepala Badan nomor 2572/I1/OT/2020 tanggal 27 Mei 2020.



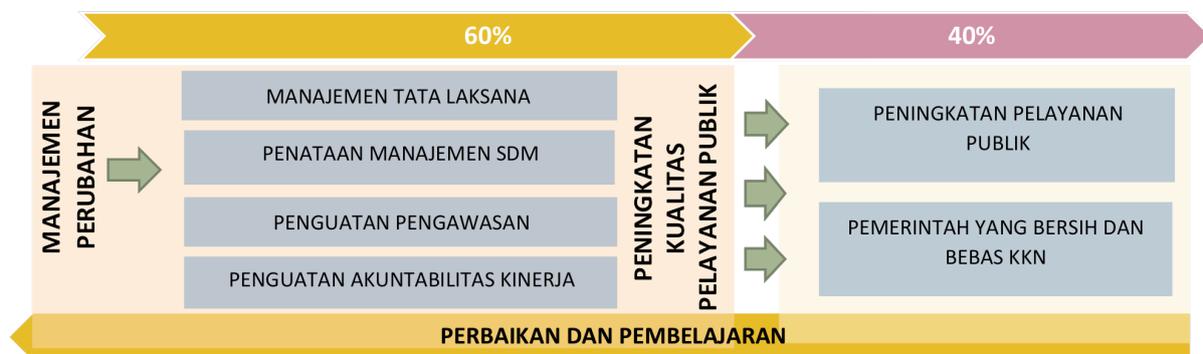
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa saat ini terpacu untuk berkompetisi saling menunjukkan kinerja yang terbaik kepada publik. Kompetisi yang sehat dan positif antar Kementerian/Lembaga menimbulkan banyak indikator yang menjadi barometer bagi instansi pemerintah bertata kelola baik. Beberapa indikator

tersebut antara lain adalah Opini Laporan Keuangan, skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, indeks persepsi korupsi, indeks kepuasan pelayanan publik, tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan lain-lain.

Wilayah Bebas dari Korupsi berdasarkan Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (*self assessment*) oleh TPI. Setelah melakukan penilaian, TPI

melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke Kementerian sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat dan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

Setelah unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen.



Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Di bawah ini adalah tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tata Laksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Komponen pengungkit dalam lembar kerja evaluasi WBK memiliki rincian bobot sebagai berikut:

NO	UNSUR KOMPONEN HASIL	BOBOT (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Dalam komponen hasil pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN  
 Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:
  - a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan
  - b. Presentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
  
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat  
 Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).

Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai koordinator pelaksanaan ZI-WBK di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, melakukan pendampingan dan reviu atas lembar kerja evaluasi WBK berdasarkan Permenpan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52



Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pada Tahun 2020 karena adanya pandemi yang melanda, pendampingan dilakukan melalui pertemuan daring, dengan tujuan satuan kerja yang diusulkan memiliki persiapan yang maksimal baik dari data dukung maupun sarana dan prasarana penunjang penilaian tersebut.

Setelah dilakukan reviu oleh Tim RBI Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, tahap selanjutnya adalah reviu oleh tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) yang dikoordinasi oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud dengan metode pendampingan melalui daring dengan melibatkan Tim RBI dari BPP Bahasa. Pada tahap ini, dari enam satuan kerja yang diusulkan ternyata hanya empat satuan kerja yang lolos ke tahap selanjutnya. Adapun satuan kerja yang tidak lolos pada tahap PMPZI yaitu:

1. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dikarenakan salah satu komponen syarat minimal tidak terpenuhi, dan
2. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dikarenakan salah satu komponen syarat minimal tidak terpenuhi.

Saat ini proses penilaian satuan kerja sebagai satuan kerja WBK sudah memasuki tahap Tim Penilai Nasional (TPN) yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB. Pada tahap ini, Kemenpan RB melakukan survei internal dan survei eksternal. Survei internal dilaksanakan pada ASN yang ada pada satuan kerja terkait dengan jumlah yang ditetapkan oleh TPN dan menitikberatkan pada pemahaman terkait integritas jabatan dan evaluasi organisasi. Untuk survei eksternal dilaksanakan pada masyarakat pengguna layanan pada tiap satuan kerja terkait dengan jumlah yang ditetapkan oleh TPN. Pada tahap ini Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat dinyatakan tidak lolos dikarenakan hasil survei eksternal tidak mencapai hasil minimal yang ditetapkan oleh TPN KemenpanRB.

Dari semua tahapan penilaian satuan kerja sebagai satuan kerja WBK yang telah dilaksanakan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Sekretariat Badan sebagai koordinator pelaksanaan ZI-WBK telah melaksanakan pembinaan terhadap satuan kerja yang diusulkan sebagai satuan kerja WBK di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dari semula enam satuan kerja yang dilakukan pembinaan, sampai pada tahap TPN tersisa tiga satuan kerja yang lolos yaitu 1) Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, 2) Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta, dan 3) Balai Bahasa Provinsi Bali. Diharapkan akhirnya pada saat penetapan predikat WBK yang tiap tahun dilaksanakan pada tanggal 9 Desember, ketiga satuan kerja tersebut dapat menerima predikat WBK dari Kemenpan RB sebagai salah satu indikator telah dilaksanakannya reformasi birokrasi sebagai upaya terwujudnya instansi bertata kelola baik (*good governance*).

Pelayanan terhadap masyarakat menjadi salah satu fokus pelaksanaan ZI-WBK,

untuk itu masing-masing satuan kerja meningkatkan kualitas layanan dengan memunculkan inovasi sesuai dengan karakteristik masing-masing satuan kerja. Peningkatan layanan atau inovasi terkait layanan terhadap masyarakat beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

### 1. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

- Pada layanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia terdapat laman portal pelaporan data satu pintu sehingga memudahkan peserta untuk mengikuti UKBI standar berbasis luring dan daring, serta sertifikat hasil UKBI diserahkan maksimal setelah tiga hari kerja.
- Pada layanan ahli bahasa bisa dilakukan secara daring dengan menggunakan laman <http://ahlibahasa.kemdikbud.go.id/home.php> dan melalui kelas daring, serta konsultasi kebahasaan yang akan dijawab dalam waktu 1x24 jam.



- Pada layanan penerjemahan dapat mengajukan permohonan melalui <https://s.id/PenerjemahanPusbin> selain itu Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra juga mengadakan kegiatan penerjemahan dengan mengakomodasi peserta tuli, menyediakan juru bahasa isyarat serta menyediakan penjurubahasaan jarak jauh.

### 2. Balai Bahasa Provinsi D.I .Yogyakarta

Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan ZI-WBK mempunyai layanan unggulan yaitu Kamus Bahasa Jawa, Tata Bahasa Jawa Mutakhir, Ejaan Bahasa Jawa sudah acuan/pedoman bahasa (Jawa).

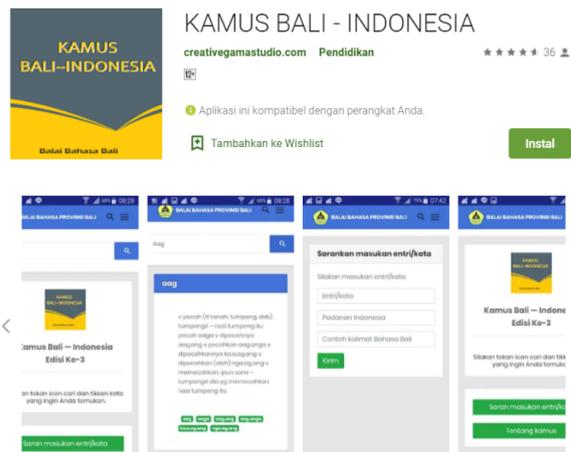
### 3. Balai Bahasa Provinsi Bali

- Ruang ULT Balai Bahasa Provinsi Bali merupakan ruang pertemuan bersemuka yang disediakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali sejak 1 Februari 2019. Ruang ULT Balai Bahasa Provinsi Bali merupakan fasilitas yang pertama di lingkungan Balai/Kantor Bahasa yang bertujuan untuk memberikan

layanan informasi tentang kebahasaan dan kesastraan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Waktu pelayanannya setiap hari Senin s.d. Jumat selama jam kerja tanpa ada jam istirahat.

- Penyediaan formulir permohonan layanan yang mudah diakses dan jelas melalui laman dan android sehingga memudahkan pengguna layanan dalam menyampaikan permohonan layanan. Laman Balai Bahasa Provinsi Bali <http://balaibahasaprovincibali.kemdikbud.go.id/>.
- Pojok Baca adalah ruang tempat membaca yang disediakan untuk pengunjung dan pengguna layanan yang datang ke Balai Bahasa Provinsi Bali. Di sana disediakan buku-buku tentang pendidikan, ilmu pengetahuan, serta karya-karya kebahasaan dan kesastraan.
- Rumah BIPA merupakan jenis layanan pengajaran BIPA bagi warga negara asing (WNA), baik di Balai Bahasa Provinsi Bali maupun langsung ke tempat pemelajar. Di tengah pandemi ini, Balai Bahasa Provinsi Bali masih tetap melayani para WNA untuk belajar bahasa Indonesia, yaitu secara virtual.

- Penyediaan Kamus Bali-Indonesia daring, layanan ini disediakan Balai Bahasa Provinsi Bali yang bertujuan untuk mengefisiensikan anggaran dalam pencetakan kamus dan memudahkan dalam membawa kamus (kamus dalam genggam) sehingga memudahkan dalam memberikan informasi dan memfasilitasi masyarakat dalam menemukan padanan kata Bali—Indonesia. Kamus ini akan diperbaharui secara berkala setiap saat dan berdasarkan masukan masyarakat. Kamus tersebut dapat diunduh melalui tautan [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wBalaiBahasaBali\\_12028244](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wBalaiBahasaBali_12028244).



- Bahan Bacaan digital ini disediakan adalah untuk mengefisiensikan anggaran pencetakan buku dan distribusinya sehingga semua masyarakat dapat lebih mudah membaca literatur bahan bacaan literasi dengan cukup mengakses laman balai Bahasa Provinsi Bali melalui tautan <http://balaibahasaprovincibali.kemdikbud.go.id/buku-terbitan-digital/>.
- Studio SUBASITA Balai Bahasa Provinsi Bali merupakan ruang rekaman yang disediakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali sejak 1 September 2020 untuk melakukan siaran dan bincang terkait informasi kebahasaan dan kesastraan secara daring melalui kanal youtube Balai Bahasa Provinsi Bali. Studio

SUBASITA Balai Bahasa Provinsi Bali merupakan fasilitas yang pertama di lingkungan Balai/Kantor Bahasa yang bertujuan untuk memberikan layanan informasi tentang kebahasaan dan kesastraan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Waktu siaran yaitu setiap Rabu dan Jumat. Tautan Youtube Balai Bahasa Provinsi Bali <https://www.youtube.com/channel/UCaxwCIGyyLC9Fk-ohehUBdA/videos>.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK, didukung oleh komponen kegiatan, yaitu sebagai berikut.



Dalam upaya pencapaian target indikator Jumlah Satker yang Dibina Menuju ZI-WBK, terdapat kendala atau hambatan yang ditemui, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Belum adanya kesepahaman pada satuan kerja yang ditunjuk terkait data dukung lembar kerja evaluasi ZI-WBK.
2. Standar minimal sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan kerja dalam pemenuhan layanan belum seragam.

Upaya yang dilakukan oleh Sekretariat BPP Bahasa untuk mengatasi kendala dan hambatan, adalah sebagai berikut.

1. Melakukan sosialisasi ZI-WBK secara berkala kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
2. Merumuskan kebijakan standar sarana dan prasarana terkait pelayanan masyarakat yang harus disiapkan oleh setiap satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

# 3

## Indikator Kinerja Kegiatan

### Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91



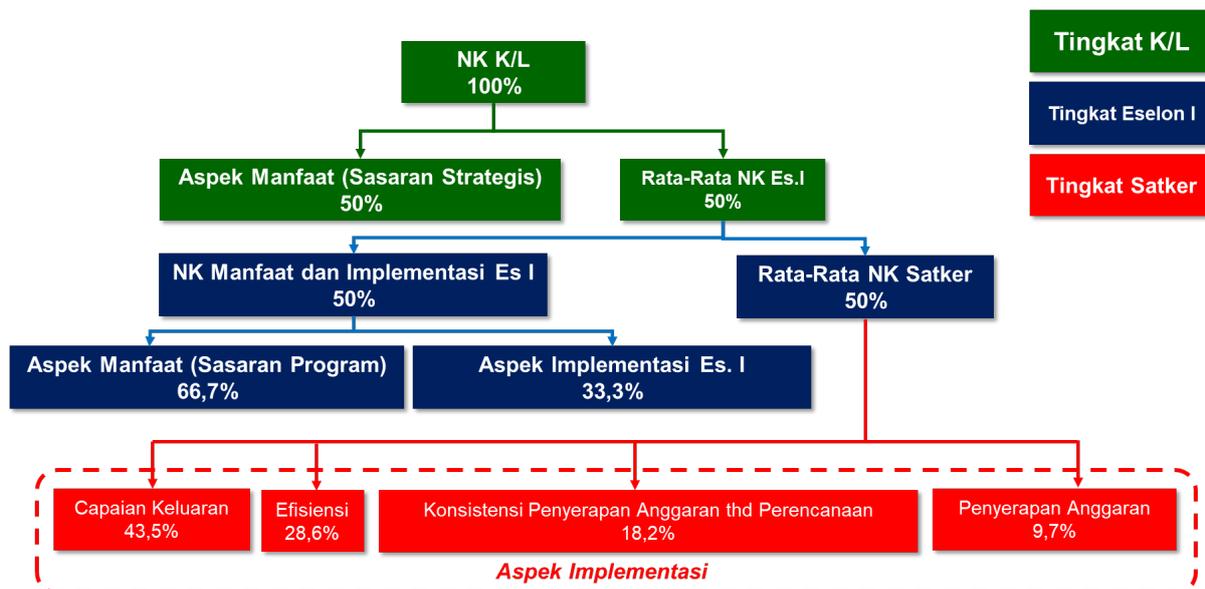
Kinerja anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Pelaksanaan program dan anggaran Kementerian/Lembaga yang telah selesai dihitung hingga diperoleh nilai kinerja anggaran setiap satker. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas tiga aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat. Hal tersebut

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 241 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Selain itu, dalam melaksanakan evaluasi kinerja anggaran juga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 195 tahun 2008 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%. Bobot masing-masing variabel pada aspek implementasi, terdiri atas capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

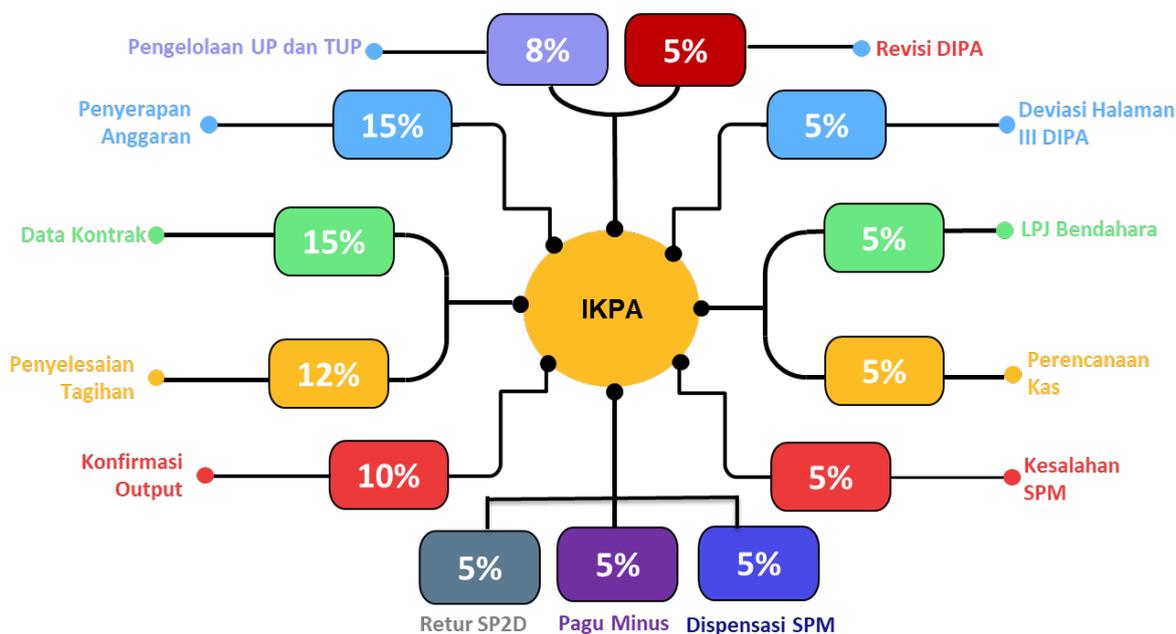
Gambar 9

Alur Proporsi Nilai Kinerja Anggaran Berdasarkan Kewenangan



Gambar 10.

Variabel Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)



Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Pada Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020—2024, Sekretariat BPP Bahasa memiliki target indikator kinerja kegiatan ketiga, yaitu **“Rata—Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91”**. Jadi, nilai rata-rata kinerja anggaran satuan kerja di lingkungan Badan Bahasa yang harus dicapai pada tahun 2020 adalah sebesar 91.

Untuk melihat capaian indikator kinerja Rata—Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3**

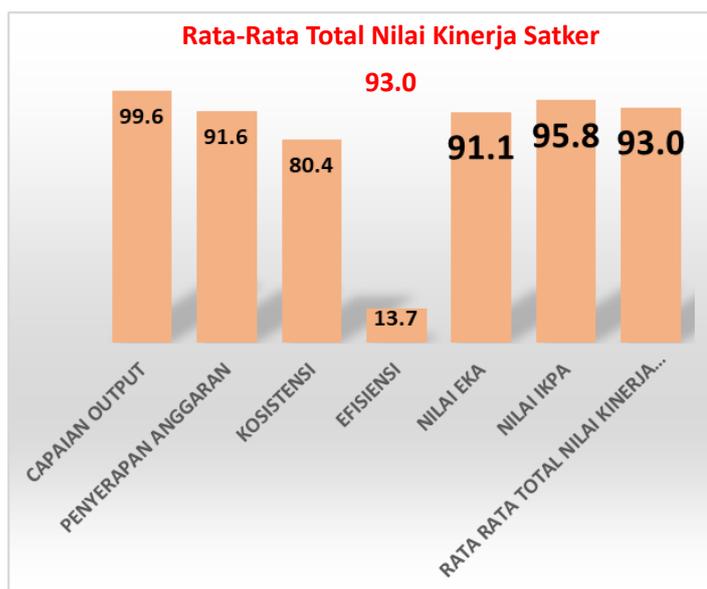
**Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Rata—Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2020			Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	%	
Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	91,0	93,0	102	95

Indikator Kinerja “Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91” tingkat capaiannya adalah sebesar 93,0 atau 102%. Target kinerja indikator tersebut dapat dicapai dengan baik oleh Sekretariat BPP Bahasa di tahun 2020. Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran Satker diperoleh dari hitungan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian kinerja anggaran setiap variabel dengan bobot yang berbeda-beda, kemudian nilai setiap variabel tersebut dirata-ratakan untuk menghasilkan total nilai kinerja.

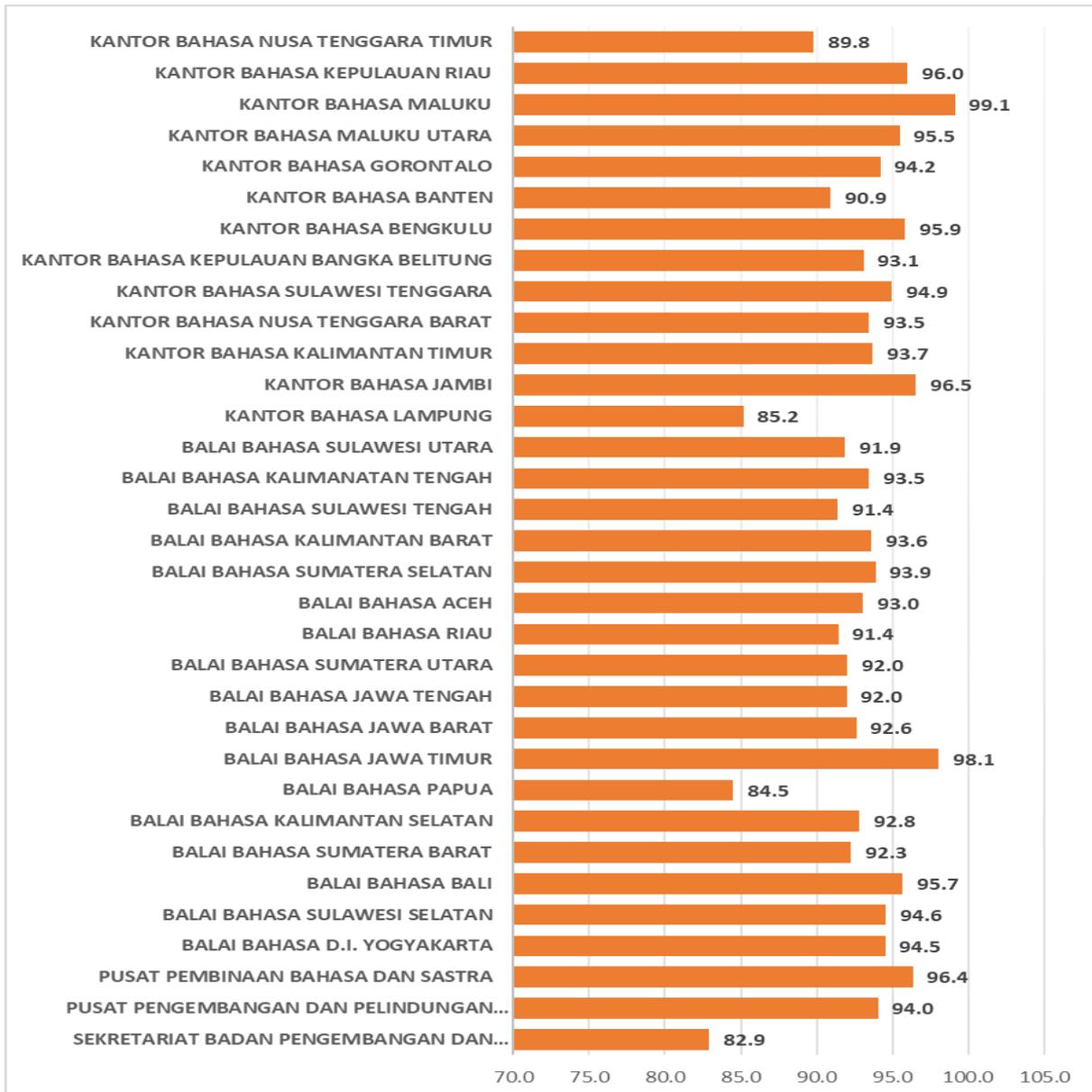
**Grafik 5**

**Nilai Rata-Rata Setiap Variabel**



Grafik 6.

Total Nilai Kinerja Anggaran Satker di Lingkungan Badan Bahasa



29 satker dengan kategori nilai kinerja anggaran sangat baik dengan nilai di atas 90 persen dan 4 satker dengan kategori baik dengan nilai antara 80—90 persen. Jika diamati setiap nilai per variabel pada empat satker yang nilai kinerjanya 80—90 persen, dipengaruhi oleh rendahnya nilai variabel efisiensi dan konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD), satker tersebut adalah Sekretariat BPP Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Papua, Kantor Bahasa Provinsi Lampung, dan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk Satker Sekretariat BPP Bahasa, rincian nilai setiap variabel, yaitu capaian

output 100%, penyerapan anggaran 94,13%, konsistensi atas RPD 39,09%, efisiensi 5,87%, sehingga nilai EKA sebesar 78,24%. Untuk nilai IKPA sebesar 89,88%, sehingga total nilai kinerja yang diperoleh Sekretariat BPP Bahasa sebesar 82,90% dengan kategori baik.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan “Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91”, didukung oleh komponen kegiatan, yaitu sebagai berikut.



Dalam upaya pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker tahun 2020, terdapat kendala atau hambatan yang ditemui, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa satker kurang maksimal dalam pencapaian output.
2. Nilai konsistensi Beberapa satker rendah karena deviasi pada lembar III DIPA terkait Rencana Penarikan Dana (RPD) terhadap penggunaan anggaran.
3. Nilai IKPA kurang optimal karena beberapa variabel nilainya rendah, seperti kurang konsisten terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD), penyerapan anggaran, dll.

Upaya yang dilakukan oleh Sekretariat BPP Bahasa untuk mengatasi kendala dan hambatan, adalah sebagai berikut.

1. Melakukan jadwal ulang pelaksanaan kegiatan dan mengubah metode pelaksanaan kegiatan.
2. Melakukan revisi RKA-K/L untuk optimalisasi dan percepatan penyerapan anggaran.
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak eksternal terkait, agar kendala/hambatan dalam pencapaian target kinerja dapat diatasi.
4. Melakukan pendampingan kepada satker untuk melakukan pengisian

- capaian kinerja setiap triwulan dan optimalisasi capaian kinerja.
- Memperbaiki dan menyesuaikan informasi kinerja dalam rangka untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran.

## B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam DIPA awal tahun 2020 sebesar Rp169.602.615.000 (seratus enam puluh sembilan miliar enam ratus dua juta enam ratus lima belas ribu rupiah). Pada perjalanannya, anggaran Sekretariat BPP Bahasa mengalami empat kali revisi anggaran dengan melakukan efisiensi anggaran yang disebabkan oleh beberapa kebijakan nasional yang dikeluarkan, di antaranya efisiensi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, pemenuhan pulsa bagi peserta didik, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan pemenuhan kebutuhan internal, yaitu pengalihan dan penyesuaian belanja pegawai ke UPT dan optimalisasi anggaran belanja barang antar komponen kegiatan untuk kegiatan peningkatan kompetensi anggota Kelompok Kepakaran Layanan Profesional (KKLP), sehingga anggaran terakhir Sekretariat BPP Bahasa sebesar Rp128.380.501.000,- (seratus dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus seribu rupiah). Dari jumlah anggaran tersebut, Sekretariat BPP Bahasa berhasil merealisasikan anggarannya sebesar Rp120.847.471.448,- (seratus dua puluh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) atau 94,13%. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian Sasaran Strategis **Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa** yang didukung oleh tiga Indikator Kinerja yaitu Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB, Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK, dan Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

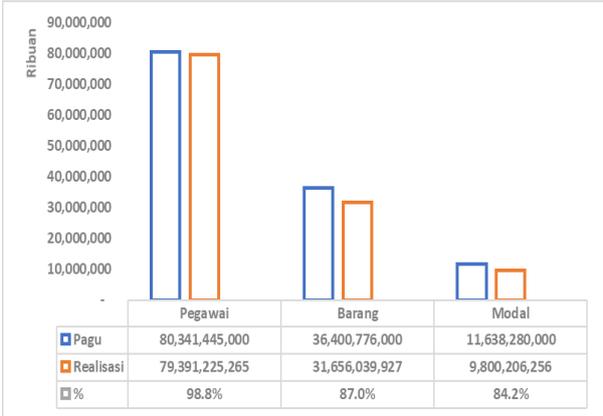
**Table 4.**

### Penyerapan Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan

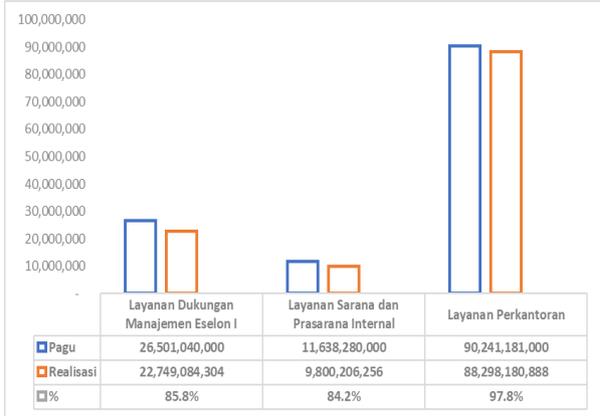
Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Revisi	Realisasi Anggaran	% Realisasi
Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB	17,121,680,000	8,236,880,000	7.453,058.103	90.5
	Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK	29,756,891,000	23,954,490,000	20,714.127.066	86.5
	Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran Satker Minimal 91	122,724,044,000	96,189,131,000	93.000.023.673	96.7



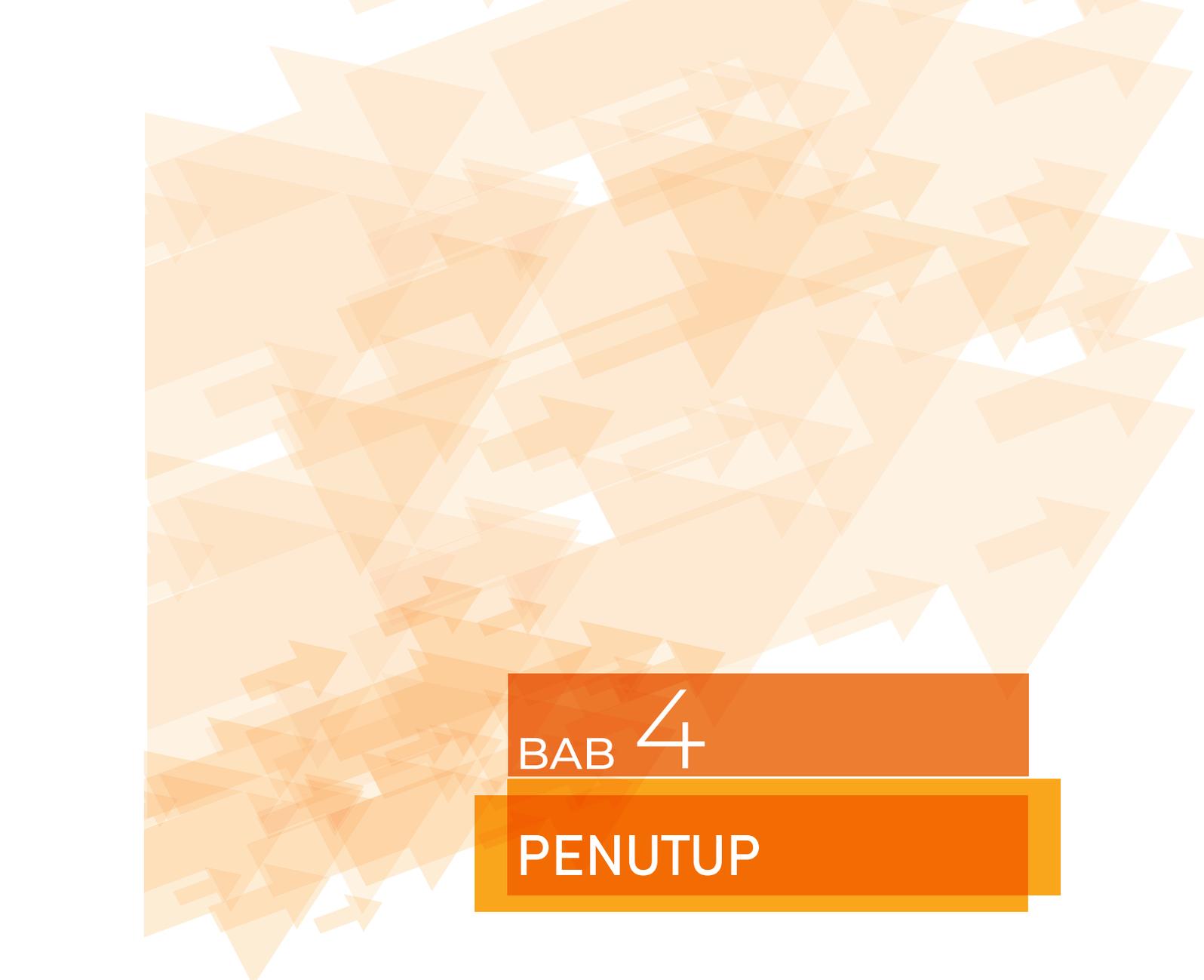
**Grafik 6.**  
**Penyerapan Anggaran Per Belanja**



**Grafik 7.**  
**Penyerapan Anggaran Per Output Kegiatan**







## BAB 4

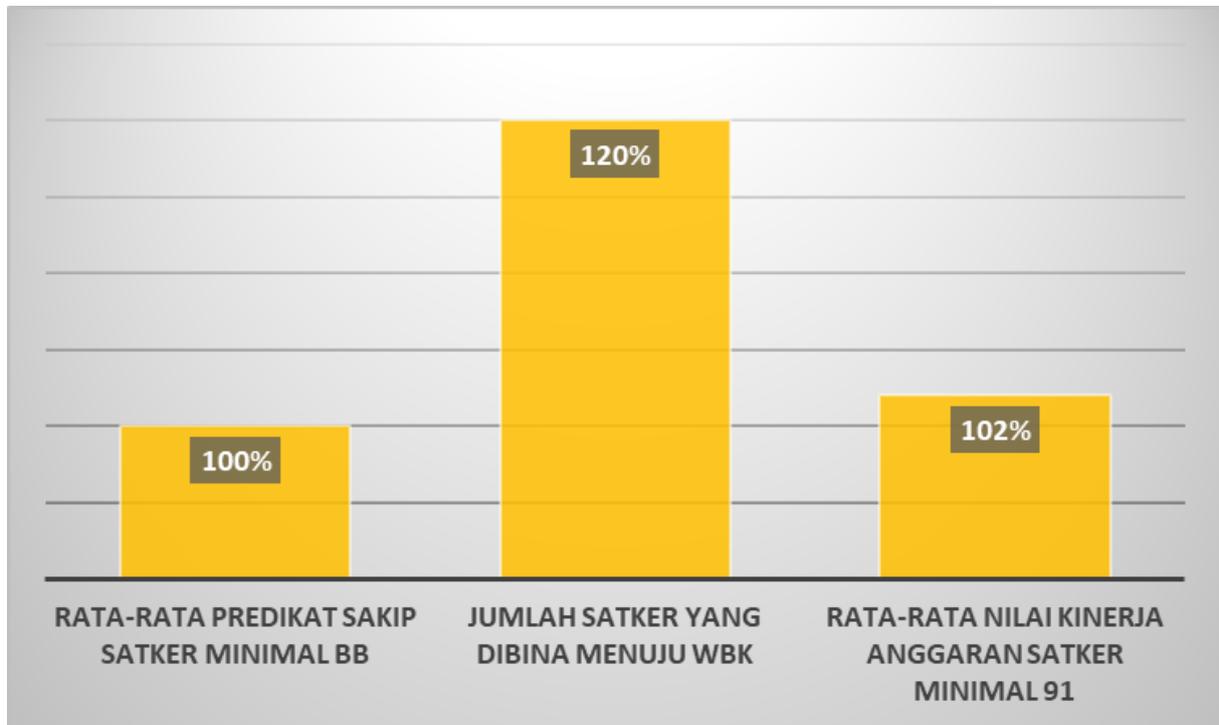
# PENUTUP

Dalam tahun anggaran 2020, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berhasil mencapai target seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang mendukung pencapaian target sasaran strategis “Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa”. Berikut ini ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan tahun 2020.

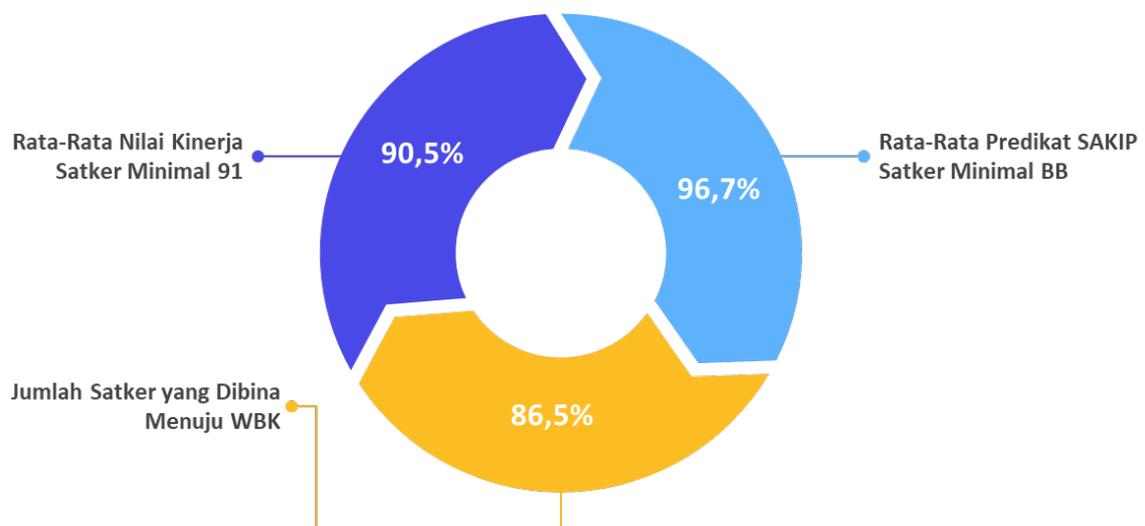
1. Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB dapat dicapai dengan baik, dari target yang ditetapkan, tercapai 100% dengan capaian Rata-Rata Predikat SAKIP Satker di tahun 2020 memperoleh nilai BB.
2. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK dapat dicapai dengan baik, dari target yang ditetapkan sebanyak 5 satker dibina menuju WBK di tahun 2020, dapat terealisasi sebanyak 6 satker, sehingga persentase capaian sebesar 120%.

3. Capaian Indikator Kinerja Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran Satker Minimal 91 di tahun 2020, dapat dicapai dengan baik, dengan persentase capaian sebesar 102% dengan skor Total Nilai Kinerja 93,0.

**Grafik 7.**  
**Presentase Capaian Setiap Indikator Kinerja Kegiatan**



**Grafik 8.**  
**Presentase Capaian Anggaran Setiap Indikator Kinerja Kegiatan**





Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, direkomendasikan beberapa hal yang perlu mendapat

perhatian sebagai berikut.

1. Penguatan akuntabilitas kinerja harus terus dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi.
2. Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) harus terus dilakukan setiap tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan kualitas kinerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
3. Peningkatan fungsi koordinasi, baik internal maupun eksternal.
4. Peningkatan kualitas publikasi kebahasaan dan kesastraan.
5. Peningkatan fungsi kerja sama kebahasaan dan kesastraan.
6. Peningkatan kualitas layanan di lingkungan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.



# LAMPIRAN

LAPORAN  
KINERJA

SEKRETARIAT  
BADAN PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN BAHASA

2020





**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**  
**Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**  
**dengan**  
**Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ovy Soviaty Rivay

Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : E. Aminudin Aziz

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan  
Bahasa

(E. Aminudin Aziz)

Jakarta, Agustus 2020  
Sekretaris Badan  
Pengembangan dan Pembinaan  
Bahasa

(Ovy Soviaty Rivay)



2008240627443

**TARGET KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	1.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB
		1.2 Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	5,00
		1.3 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	nilai	91,00

**KEGIATAN DAN ANGGARAN**

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	150.868.636.000
TOTAL			150.868.636.000

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan  
Bahasa



(E. Aminudin Aziz)

Jakarta, Agustus 2020  
Sekretaris Badan Pengembangan  
dan Pembinaan Bahasa



(Ovy Soviaty Rivay)



2008240627443



**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**  
**Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**  
**dengan**  
**Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ovi Soviaty Rivay

Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
 untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : E. Aminudin Aziz

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
 selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan  
 Bahasa

E. Aminudin Aziz

Jakarta, Desember 2020  
 Sekretaris Badan  
 Pengembangan dan Pembinaan  
 Bahasa

Ovi Soviaty Rivay



2101120512027

**TARGET KINERJA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	1.1 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	predikat	BB
		1.2 Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	satker	5,00
		1.3 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91	nilai	91,00

**KEGIATAN DAN ANGGARAN**

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	128.380.501.000
TOTAL			128.380.501.000

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan  
Bahasa



(E. Aminudin Aziz)

Jakarta, Desember 2020  
Sekretaris Badan Pengembangan  
dan Pembinaan Bahasa



(Ovi Soviaty Rivay)



2101120512027

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu laporan kinerja ..... Sekretariat Badan ..... untuk tahun anggaran 2020, sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 19 November 2020  
Badan Pengembangan dan  
Pembinaan Bahasa



Ratna Perwitasari  
NIP. 198306292008012004



Catatan:

1.1. Pada Bab I ditambahkan informasi: gambaran umum, sejarah organisasi, nama pimpinan, dan jumlah SDM. Struktur organisasi 2020 harap disesuaikan peraturan yg berlaku.

1.4. Lamiran yg harus disertakan:

1) PK

2) RKT

3) Renaksi

4) Pengukuran kinerja

5) SK hm penyusun LAKIP (melibatkan kepala satker dan koordinator kegiatan)

6) caseeading renstra

7) notula pemanfaatan LAKIP sbg bahan evaluasi dg pihak terkait.

1.5. Pada Bab IV dipertajam mengenai hambatan yg dihadapi dan langkah yg akan dilakukan di masa mendatang utk meningkatkan kinerja.

2.2. Bab VII menyampaikan mengenai:

a.) informasi SS dan IKK sesuai dg PK dan renstra. Apabila terdapat perubahan, mohon dijelaskan.

b.) langkah pelaksanaan dan komponen pendukung, IKK, mohon dijelaskan.

c.) adanya evaluasi, analisis ketercapaian dan ketidaktercapaian, hambatan, dan strategi pencapaian.

d.) adanya informasi efisiensi sumber daya.

e.) LAKIP menyandingkan target dan realisasi tahun 2020 dan target akhir renstra.

f.) perhatikan konsistensi data.

g.) Pada akhir bab III outcome dari kegiatan

Setelah LAKIP disusun, harus ada rapat mengenai evaluasi pelaksanaan program. Rapat tersebut menghasilkan notula bahwa data LAKIP digunakan untuk perbaikan perencanaan kedepan oleh kepala satker dan penanggung jawab kegiatan.

**PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT BPP BAHASA  
TAHUN 2020**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%	Anggaran Awal	Anggaran Revisi	Realisasi Anggaran	% Realisasi
Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB	Predikat	BB	BB	100	17.121.680.000	8.236.880.000	7.453,058.103	90,5
	Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK	Satker	5	6	120	29.756.891.000	23.954.490.000	20.714.127.066	86,5
	Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran Satker Minimal 91	Nilai	91	93	102	122.724.044.000	96.189.131.000	93.000.023.673	96,7

**REALISASI ANGGARAN PER KOMPONEN KEGIATAN  
SEKRETARIAT BPP BAHASA TAHUN 2020**

Kode	Uraian	Total			
		Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
137544	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	128.380.501.000	120.847.471.448	94,13	7.533.029.552
2020.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	26.501.040.000	23.014.274.140	86,84	3.486.765.860
2020.950.001	Tanpa Suboutput	26.501.040.000	23.014.274.140	86,84	3.486.765.860
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	2.843.159.000	2.423.290.115	85,23	419.868.885
052	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	2.040.117.000	1.975.154.638	96,82	64.962.362
053	Layanan Keuangan	1.171.788.000	1.102.044.800	94,05	69.743.200
054	Layanan Akuntansi dan Pelaporan	1.322.370.000	1.221.344.050	92,36	101.025.950
055	Layanan Tata Laksana, Hukum, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	623.791.000	433.152.600	69,44	190.638.400
056	Layanan Kepegawaian	934.069.000	838.106.150	89,73	95.962.850
057	Peningkatan Kompetensi Pegawai	4.315.294.000	3.150.926.987	73,02	1.164.367.013
058	Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	7.433.154.000	6.724.159.029	90,46	708.994.971
060	Layanan Barang Milik Negara	1.715.248.000	1.426.655.744	83,17	288.592.256
062	Pengelolaan Perpustakaan	670.850.000	597.124.862	89,01	73.725.138
063	Layanan Data dan Sistem Informasi di Lingkungan Badan	1.498.042.000	1.301.772.450	86,90	196.269.550
064	Layanan Hubungan Masyarakat	1.697.738.000	1.607.098.150	94,66	90.639.850
065	Layanan Kerja Sama kebahasaan dan kesastran	157.824.000	145.742.750	92,35	12.081.250
066	Koordinasi Gerakan Literasi Nasional	77.596.000	67.701.815	87,25	9.894.185
2020.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	11.638.280.000	9.800.206.256	84,21	1.838.073.744
2020.951.001	Tanpa Suboutput	11.638.280.000	9.800.206.256	84,21	1.838.073.744
995	Pengadaan Kendaraan Bermotor	1.710.690.000	1.631.000.000	95,34	79.690.000
996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi	1.179.392.000	1.095.166.994	92,86	84.225.006
997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	4.429.398.000	3.719.375.551	83,97	710.022.449
998	Gedung dan Bangunan	4.318.800.000	3.354.663.711	77,68	964.136.289
2020.994	Layanan Perkantoran	90.241.181.000	88.352.728.446	97,91	1.888.452.554
2020.994.001	Tanpa Suboutput	90.241.181.000	88.352.728.446	97,91	1.888.452.554
001	Gaji dan Tunjangan	80.341.445.000	79.449.772.823	98,89	891.672.177
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	9.899.736.000	8.902.955.623	89,93	996.780.377
	<b>TOTAL</b>	<b>128.380.501.000</b>	<b>120.847.471.448</b>	<b>94,13</b>	<b>7.533.029.552,00</b>

## NILAI SETIAP VARIABEL PADA INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SATKER

No	Satker	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Mulus	Penyempitan Data Kontrak	Ketertiban Pengelolaan Uang Persediaan	LPJ Berdharma	Retur SP2D	Realisasi Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Perencanaan Kas	Kesalahan SPM	Dispensasi SPM	Capaian Output	Nilai IKPA
1	SEKRETARIAT BADAN BAHASA DAN SASTRA	1	12,0	99,9	92,5	66,7	83,0	99,3	95,1	95,7	0,0	80,0	100,0	83,3	89,9
2	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	1	81,9	100,0	100,0	90,9	83,0	100,0	73,3	100,0	0,0	85,0	100,0	92,9	91,7
3	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	1	95,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	80,7	100,0	0,0	80,0	100,0	97,2	95,1
4	BALAI BAHASA D. I. NOGOSAKARTA	1	92,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,0	96,7	100,0	0,0	90,0	100,0	100,0	98,8
5	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	1	71,9	93,6	100,0	88,9	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	85,0	100,0	96,7	97,3
6	BALAI BAHASA BALI	1	82,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	99,1	100,0	0,0	85,0	100,0	100,0	99,0
7	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	1	90,6	100,0	0,0	90,9	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	80,0	100,0	100,0	97,5
8	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	1	71,1	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	85,0	100,0	100,0	98,7
9	BALAI BAHASA PAPUA	1	10,8	99,9	100,0	100,0	100,0	100,0	91,8	100,0	0,0	80,0	100,0	66,7	93,5
10	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	1	51,9	97,0	100,0	92,9	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	90,0	100,0	100,0	98,6
11	BALAI BAHASA JAWA BARAT	1	97,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,8	100,0	0,0	80,0	100,0	100,0	98,6
12	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	1	77,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	95,0	100,0	100,0	99,7
13	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	1	73,6	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	80,0	100,0	98,3	98,0
14	BALAI BAHASA RIAU	1	74,5	100,0	100,0	92,9	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	85,0	100,0	98,5	98,3
15	BALAI BAHASA ACEH	1	72,9	100,0	0,0	100,0	100,0	98,2	95,5	0,0	0,0	80,0	100,0	100,0	97,0
16	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	1	80,5	96,3	0,0	100,0	83,0	100,0	100,0	0,0	0,0	80,0	100,0	83,3	93,6
17	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	1	71,3	100,0	100,0	100,0	100,0	98,3	100,0	100,0	0,0	85,0	100,0	100,0	99,0
18	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	1	95,5	100,0	100,0	100,0	100,0	97,4	100,0	100,0	0,0	80,0	100,0	100,0	98,7
19	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	1	60,3	100,0	100,0	100,0	100,0	96,9	100,0	100,0	0,0	90,0	100,0	93,9	98,5
20	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	1	65,5	100,0	100,0	40,0	100,0	100,0	89,0	100,0	0,0	80,0	100,0	81,8	89,1
21	KANTOR BAHASA LAMPUNG	1	83,2	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	80,0	100,0	100,0	81,2
22	KANTOR BAHASA JAMBI	1	95,5	100,0	0,0	57,1	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	80,0	100,0	100,0	92,4
23	KANTOR BAHASA KALIMANTAN TIMUR	1	91,8	100,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	80,0	100,0	77,3	85,3
24	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	1	73,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
25	KANTOR BAHASA SULAWESI TENGGARA	1	83,3	100,0	66,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	90,0	100,0	56,1	88,4
26	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	73,8	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	85,0	100,0	100,0	98,7
27	KANTOR BAHASA BENGKULU	1	89,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	80,0	100,0	81,8	96,0
28	KANTOR BAHASA BANTEN	1	76,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	85,0	100,0	100,0	99,1
29	KANTOR BAHASA GORONTALO	1	80,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	98,5	0,0	0,0	100,0	100,0	89,4	97,8
30	KANTOR BAHASA MALUKU UTARA	1	83,4	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
31	KANTOR BAHASA MALUKU	1	92,2	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	80,0	100,0	100,0	98,3
32	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	1	97,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	85,0	100,0	100,0	99,1
33	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	1	39,1	100,0	100,0	75,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	80,0	100,0	100,0	96,5

**REALISASI ANGGARAN PER KOMPONEN KEGIATAN  
SEKRETARIAT BPP BAHASA TAHUN 2020**

Kode	Uraian	Total			
		Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
137544	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	128.380.501.000	120.847.471.448	94,13	7.533.029.552
2020.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	26.501.040.000	23.014.274.140	86,84	3.486.765.860
2020.950.001	Tanpa Suboutput	26.501.040.000	23.014.274.140	86,84	3.486.765.860
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	2.843.159.000	2.423.290.115	85,23	419.868.885
052	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran	2.040.117.000	1.975.154.638	96,82	64.962.362
053	Layanan Keuangan	1.171.788.000	1.102.044.800	94,05	69.743.200
054	Layanan Akuntansi dan Pelaporan	1.322.370.000	1.221.344.050	92,36	101.025.950
055	Layanan Tata Laksana, Hukum, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	623.791.000	433.152.600	69,44	190.638.400
056	Layanan Kepegawaian	934.069.000	838.106.150	89,73	95.962.850
057	Peningkatan Kompetensi Pegawai	4.315.294.000	3.150.926.987	73,02	1.164.367.013
058	Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	7.433.154.000	6.724.159.029	90,46	708.994.971
060	Layanan Barang Milik Negara	1.715.248.000	1.426.655.744	83,17	288.592.256
062	Pengelolaan Perpustakaan	670.850.000	597.124.862	89,01	73.725.138
063	Layanan Data dan Sistem Informasi di Lingkungan Badan	1.498.042.000	1.301.772.450	86,90	196.269.550
064	Layanan Hubungan Masyarakat	1.697.738.000	1.607.098.150	94,66	90.639.850
065	Layanan Kerja Sama kebahasaan dan kesastran	157.824.000	145.742.750	92,35	12.081.250
066	Koordinasi Gerakan Literasi Nasional	77.596.000	67.701.815	87,25	9.894.185
2020.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	11.638.280.000	9.800.206.256	84,21	1.838.073.744
2020.951.001	Tanpa Suboutput	11.638.280.000	9.800.206.256	84,21	1.838.073.744
995	Pengadaan Kendaraan Bermotor	1.710.690.000	1.631.000.000	95,34	79.690.000
996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi	1.179.392.000	1.095.166.994	92,86	84.225.006
997	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	4.429.398.000	3.719.375.551	83,97	710.022.449
998	Gedung dan Bangunan	4.318.800.000	3.354.663.711	77,68	964.136.289
2020.994	Layanan Perkantoran	90.241.181.000	88.352.728.446	97,91	1.888.452.554
2020.994.001	Tanpa Suboutput	90.241.181.000	88.352.728.446	97,91	1.888.452.554
001	Gaji dan Tunjangan	80.341.445.000	79.449.772.823	98,89	891.672.177
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	9.899.736.000	8.902.955.623	89,93	996.780.377
	<b>TOTAL</b>	<b>128.380.501.000</b>	<b>120.847.471.448</b>	<b>94,13</b>	<b>7.533.029.552,00</b>





## **Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun,  
Jakarta Timur 13220

Telepon (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894564

Faksimile (021) 4750407

Pos-el [badan.bahasa@kemdikbud.go.id](mailto:badan.bahasa@kemdikbud.go.id)

 [badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id)

 [@BadanBahasa](https://twitter.com/BadanBahasa)

 [badanbahasakemdikbud](https://www.instagram.com/badanbahasakemdikbud)

 [Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa](https://www.facebook.com/BadanPengembangan-dan-Pembinaan-Bahasa)

 [Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa](https://www.youtube.com/BadanPengembangan-dan-Pembinaan-Bahasa)